

# Pengalaman Praktisi Akuntansi dalam Transformasi Pelaporan Keuangan dari Badan Layanan Umum ke Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Dhani Andika<sup>1✉</sup>, Nur Handayani<sup>2</sup>

(1,2,) Program Studi S2 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Indonesia

**Abstrak:** Transformasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) membawa perubahan mendasar dalam sistem pelaporan keuangan, terutama peralihan dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menuju Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyusunan laporan keuangan, tetapi juga memengaruhi pengalaman dan cara praktisi akuntansi memaknai pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna perubahan sistem pelaporan keuangan dari BLU ke PTNBH berdasarkan pengalaman hidup (lived experiences) praktisi akuntansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap empat praktisi akuntansi yang terlibat secara langsung dalam proses transformasi pelaporan keuangan PTNBH. Analisis menghasilkan tiga tema utama, yaitu memaknai profesionalitas, memaknai pengembangan sistem informasi akuntansi, dan memaknai interpretasi standar akuntansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan sistem pelaporan keuangan dari BLU ke PTNBH tidak sekadar merupakan perubahan teknis penyusunan laporan keuangan, tetapi merupakan proses transformasi profesional dan kemandirian yang membentuk cara berpikir, cara bekerja, dan tanggung jawab praktisi akuntansi dalam menghasilkan informasi keuangan yang akuntabel.

**Abstract:** The transformation of Public Service Agency (BLU) State Universities into State Universities with Legal Entity Status (PTNBH) has brought about fundamental changes in the financial reporting system, particularly the transition from Government Accounting Standards (SAP) to Financial Accounting Standards (SAK). This change not only impacts the technical aspects of financial statement preparation but also influences the experiences and the way accounting practitioners perceive their work. This study aims to uncover the meaning of the shift in the financial reporting system from BLU to PTNBH based on the lived experiences of accounting practitioners. The study employs a qualitative approach using the *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) method. Data were collected through in-depth interviews with four accounting practitioners directly involved in the PTNBH financial reporting transformation process. The analysis yielded three main themes: interpreting professionalism, interpreting the development of accounting information systems, and interpreting accounting standards. This study concludes that the change in the financial reporting system from BLU to PTNBH is not merely a technical change in the preparation of financial statements, but rather a process of professional transformation and autonomy that shapes the way accounting practitioners think, work, and fulfill their responsibilities in producing accountable financial information.

## Article history:

Received: 29 June 2026

Revised: 22 July 2026

Accepted: 11 August 2026

Published: 21 August 2026

## Kata kunci:

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), Sistem Pelaporan Keuangan, Standar Akuntansi Keuangan (SAK), *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA), Profesionalitas Akuntansi

## Keyword:

State-Owned Legal Entity Universities (PTNBH), Financial Reporting System, Financial Accounting Standards (SAK), *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA), Accounting Professionalism

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



**How to cite:** Andika, D., & Handayani, N. (2026). Pengalaman Praktisi Akuntansi dalam Transformasi Pelaporan Keuangan dari Badan Layanan Umum ke Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 4(3), 1011–1022. <https://doi.org/10.70716/emis.v4i3.798>

## PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 mengenai Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum menandai babak baru dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) (Herlina et al., 2023). Perubahan status perguruan tinggi dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) membawa konsekuensi terhadap berbagai aspek pengelolaan keuangan, khususnya sistem dan pelaporan keuangan. Perubahan status tersebut tidak hanya mengubah kerangka tata kelola keuangan, tetapi juga diikuti dengan penyesuaian kebijakan akuntansi, sistem informasi akuntansi, mekanisme penyusunan laporan keuangan, serta praktik akuntansi yang diterapkan di lingkungan PTNBH. Dengan demikian, perubahan pelaporan keuangan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perubahan prosedur administratif, tetapi juga sebagai perubahan dalam cara praktisi akuntansi memahami, menginterpretasikan, dan menjalankan praktik pelaporan keuangan.

Salah satu perubahan yang paling mendasar adalah beralihnya standar akuntansi yang digunakan dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Perubahan ini menuntut organisasi untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi, sistem informasi, prosedur kerja, serta kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji transformasi PTNBH dari berbagai perspektif, seperti tata kelola, akuntabilitas, implementasi kebijakan, kualitas laporan keuangan, maupun pengembangan sistem informasi akuntansi. Penelitian mengenai PTNBH, misalnya, membahas implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual (Rosalia & Kawedar, 2017) serta implementasi SAK umum dan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangan PTNBH (Ernawati & Setiawan, 2023). Pengalaman reformasi akuntansi sektor publik di konteks lain juga menunjukkan bahwa perubahan standar formal tidak selalu langsung menjadi perubahan praktik; implementasinya berlangsung melalui proses adaptasi organisasi yang kompleks (Connolly & Hyndman, 2006; Lapsley, 2009). Kajian-kajian tersebut memberikan pemahaman mengenai aspek normatif dan teknis perubahan kelembagaan, namun sebagian besar masih berfokus pada implementasi standar dan sistem. Dengan demikian, pengalaman subjektif praktisi akuntansi sebagai aktor utama yang terlibat langsung dalam perubahan pelaporan keuangan masih relatif jarang dikaji.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya research gap. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual pada PTNBH (Rosalia & Kawedar, 2017), implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangan PTNBH (Ernawati & Setiawan, 2023), serta perlakuan akuntansi atas aset tetap setelah perubahan status menjadi PTNBH (Hertrianto et al., 2025). Meskipun memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman aspek implementasi dan teknis pelaporan keuangan PTNBH, penelitian-penelitian tersebut belum mengungkap bagaimana praktisi akuntansi memaknai perubahan pelaporan keuangan yang mereka alami selama proses transformasi dari BLU menjadi PTNBH. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengalaman hidup (lived experience) praktisi akuntansi untuk memahami makna perubahan pelaporan keuangan sebagai konsekuensi transformasi kelembagaan dari BLU menjadi PTNBH.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian pemahaman mengenai makna perubahan pelaporan keuangan dari perspektif praktisi akuntansi, yang masih relatif jarang dibahas dalam penelitian mengenai transformasi PTNBH. Penelitian ini memperluas kajian mengenai implementasi pelaporan keuangan dengan menunjukkan bahwa perubahan pelaporan keuangan tidak hanya merupakan konsekuensi perubahan regulasi dan standar akuntansi, tetapi juga merupakan pengalaman yang dimaknai oleh para praktisi dalam menjalankan praktik akuntansi di lingkungan PTNBH. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi sektor publik, khususnya mengenai

transformasi pelaporan keuangan pada PTNBH, serta menjadi masukan bagi perguruan tinggi dalam mengelola perubahan sistem pelaporan keuangan secara lebih efektif.

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). IPA dipilih karena berfokus pada pengalaman personal dan proses pemaknaan individu terhadap pengalaman tersebut (Smith et al., 2009). Pendekatan ini tidak diarahkan untuk menghasilkan pernyataan objektif yang terlepas dari subjek, melainkan untuk memahami bagaimana partisipan menafsirkan pengalaman yang mereka jalani. Dalam IPA, pengalaman hidup dipahami melalui proses interpretatif yang mempertemukan narasi partisipan dan penafsiran peneliti; karena itu, kedalaman pengalaman dan ketelitian interpretasi menjadi unsur penting dalam kualitas analisis (Alase, 2017; Smith, 2011). Dalam penelitian ini, IPA digunakan untuk memahami makna pengalaman praktisi akuntansi ketika menghadapi perubahan sistem pelaporan keuangan dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

### Lokasi dan Partisipan Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia yang telah mengalami transformasi dari BLU menjadi PTNBH. Partisipan ditentukan menggunakan *purposive sampling* agar individu yang dipilih memiliki pengalaman langsung dan relevan dengan fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2009). Kriteria partisipan adalah praktisi akuntansi di PTNBH, memiliki pengalaman menyusun laporan keuangan pada saat universitas berstatus BLU dan setelah menjadi PTNBH, serta bersedia diwawancarai. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian melibatkan empat praktisi akuntansi.

### Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap empat praktisi akuntansi yang terlibat langsung dalam proses transformasi pelaporan keuangan. Wawancara digunakan untuk memperoleh narasi pengalaman partisipan mengenai perubahan praktik pelaporan keuangan setelah transformasi kelembagaan. Penggunaan wawancara mendalam konsisten dengan karakter IPA yang menempatkan pengalaman personal dan cara partisipan memberi makna terhadap pengalaman tersebut sebagai sumber utama analisis (Alase, 2017; Smith et al., 2009).

### Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan tahapan *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) yang mengacu pada La Kahija (2017). Tahapan analisis meliputi: (1) penghayatan transkrip; (2) pencatatan tema-tema awal; (3) perumusan tema emergen; (4) perumusan tema superordinat; (5) identifikasi pola antarkasus; (6) penataan seluruh tema superordinat; dan (7) pelaporan hasil analisis. Proses ini digunakan untuk menelusuri pola makna yang muncul dari pengalaman masing-masing partisipan sebelum dirumuskan menjadi tema lintas kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak empat partisipan yang memenuhi kriteria penelitian berpartisipasi dalam proses wawancara. Informasi mengenai karakteristik demografis partisipan disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Informan Demografis

| Informan    | Jabatan                                   | Pendidikan               | Lama Bekerja |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Informan PW | Kepala Sub Direktorat Akuntansi dan Pajak | S1 Ekonomi, S2 Hukum     | 21 Tahun     |
| Informan AF | Kepala Seksi Akuntansi                    | S1 Ekonomi, S2 Akuntansi | 18 Tahun     |
| Informan RR | Staf Akuntansi                            | S1 Akuntansi             | 8 Tahun      |
| Informan JS | Staf Akuntansi                            | S1 Akuntansi             | 6 Tahun      |

Berdasarkan hasil analisis transkrip wawancara menggunakan pendekatan *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA), diperoleh tiga tema induk (master themes) yang mencakup enam tema superordinat (superordinate themes). Ringkasan tema-tema tersebut disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Tema Induk dan Tema Super-ordinant

| No | Tema Induk                                       | Tema Super-ordinant                                                                              |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Memaknai profesionalitas                         | Peralihan menuju praktik yang kompleks<br>Pengembangan kapasitas profesional                     |
| 2  | Memaknai Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi | Keterbatasan Sistem Informasi Akuntansi<br>Kolaborasi dalam membangun sistem informasi akuntansi |
| 3  | Memaknai Interpretasi Standar Akuntansi          | Membangun Kesepahaman Intepretasi Standar Profesional Judgement                                  |

### 1. Memaknai Profesionalitas

Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan pelaporan keuangan dari BLU menjadi PTNBH dimaknai oleh praktisi akuntansi sebagai perubahan tuntutan profesionalitas. Perubahan tersebut tidak hanya ditandai dengan beralihnya standar akuntansi dari SAP ke SAK, tetapi juga mengubah cara praktisi menjalankan pekerjaannya. Jika sebelumnya penyusunan laporan keuangan lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, setelah menjadi PTNBH praktisi dituntut memahami substansi standar akuntansi dan menerapkan pertimbangan profesional dalam setiap keputusan akuntansi.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu informan:

*"Kalau yang saya rasakan itu, dulu kan waktu masih BLU kita hanya sekedar mencatat transaksi karena segala sesuatu terkait kebijakan akuntansi baik itu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan semuanya sudah ditentukan oleh kementerian induk kita pak. Sedangkan ketika sudah bertransformasi ke PTNBH kita sendiri yang mengintepretasi kebijakan akuntansi sesuai SAK yang kita anut pak. Penyusunan laporan keuangan menggunakan SAK lumayan kompleks pak".(RR)*

*"banyak sekali perbedaannya mas. Jadi mulai dari penerapan-penerapan yang semula kita diatur pemerintah nih, kita harus melakukan asesmen sendiri".*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan sistem pelaporan keuangan telah menggeser peran praktisi akuntansi dari pelaksana aturan (*rule executor*) menjadi profesional yang dituntut untuk menginterpretasikan dan menerapkan standar akuntansi berdasarkan substansi transaksi. Perubahan tersebut tidak hanya mengubah prosedur kerja, tetapi juga mengubah cara praktisi akuntansi memaknai profesinya. Jika sebelumnya penyusunan laporan keuangan lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka setelah bertransformasi menjadi PTNBH praktisi akuntansi dituntut untuk menggunakan *professional judgement* dalam menentukan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dengan demikian, profesionalitas dimaknai sebagai kemampuan untuk memahami substansi standar, melakukan interpretasi secara tepat, serta mempertanggungjawabkan keputusan akuntansi yang diambil.

Profesionalitas tercermin dari pengalaman informan ketika menghadapi kompleksitas penerapan SAK. Kompleksitas tersebut mendorong praktisi akuntansi untuk tidak hanya mengandalkan pengalaman kerja sebelumnya, tetapi juga terus mengembangkan kompetensi melalui pembelajaran, pelatihan, dan pendalaman terhadap standar akuntansi agar mampu menyelesaikan berbagai permasalahan akuntansi secara profesional.

*"Karena banyak hal yang kami tidak tahu, kami akhirnya belajar dari mulai mengikuti pelatihan, seminar, atau secara mandiri membaca artikel dan lain sebagainya untuk menyesuaikan perubahan tersebut." (RR)*

*"Pelajaran yang saya dapat mungkin terkait tidak berhenti belajar karena dulu, karena perubahan itu sebuah keniscayaan. Jadi yang dulunya ikut-ikutan aja dengan pemerintah sekarang harus belajar sendiri untuk memahami sebuah system yang baru sebuah paradigma, sebuah pandangan yang baru dari perubahan BLU ke PTNBH. Itu sih. Tidak stop atau tidak puas dengan satu pencapaian harus tetap continues learning".*

Menariknya, perubahan tersebut tidak sepenuhnya dipandang oleh praktisi akuntansi sebagai beban atau tekanan pekerjaan. Sebaliknya, salah seorang informan memandang transformasi menuju PTNBH sebagai pengalaman yang memperkuat identitas profesionalnya. Perubahan tersebut dipersepsikan sebagai kesempatan untuk berkembang, memperluas kompetensi, dan menjalankan profesi akuntansi secara lebih profesional. Keberhasilan perubahan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana sumber daya manusia didalamnya menyikapi hal tersebut. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gigli et al. (2018) yang menyatakan bahwa kegagalan implementasi bukan semata-mata karena standar akuntansinya, tetapi karena adanya *organizational decoupling*, yaitu kondisi ketika organisasi secara formal mengadopsi sistem baru, tetapi praktik sehari-harinya masih menggunakan cara lama.

*"Perubahan ini bagi saya proses belajar yang menantang... akhirnya saya merasa ini profesi profesional yang saya inginkan." (RR)*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan pelaporan keuangan dimaknai sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri dan memperkuat identitas sebagai seorang profesional. Pengalaman menghadapi standar akuntansi yang lebih kompleks memberikan makna baru terhadap profesi akuntansi, yaitu profesi yang tidak hanya menjalankan aturan, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir kritis, interpretasi, dan pembelajaran berkelanjutan.

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan Fomina et al. (2022) bahwa perubahan standar akuntansi tidak hanya meningkatkan tuntutan kompetensi teknis, tetapi juga mendorong berkembangnya kemampuan interpretasi dan *professional judgement*. Dalam konteks penelitian ini, pengalaman tersebut dimaknai lebih jauh sebagai proses pembentukan identitas profesional yang ditandai oleh komitmen untuk terus belajar, memahami substansi standar, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan akuntansi.

*"harus lebih profesional... harus membuat inovasi... terobosan baru." (PW)*

Pernyataan informan PW menunjukkan bahwa profesionalitas tidak lagi hanya sebatas kepatuhan terhadap prosedur dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Profesionalitas dipahami sebagai kemampuan untuk menghasilkan inovasi, menciptakan terobosan, dan memberikan solusi terhadap berbagai perubahan yang muncul dalam praktik akuntansi. Dalam konteks transformasi menuju PTNBH, praktisi akuntansi tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana pekerjaan administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan (*change agent*) yang berkontribusi dalam mengembangkan sistem, memperbaiki proses kerja, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Dukungan organisasi melalui penyediaan pelatihan dan pendampingan konsultan turut memperkuat proses pengembangan kompetensi tersebut.

*"mengirimkan kawan-kawan kita untuk peningkatan kualifikasinya... ikut pelatihan-pelatihan penyusunan laporan keuangan".(PW)*

Pernyataan informan PW menunjukkan bahwa proses pembelajaran tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga didukung oleh organisasi melalui penyediaan berbagai program pengembangan kompetensi. Bagi informan, dukungan organisasi dalam bentuk pelatihan, peningkatan kualifikasi, dan pendampingan menjadi bagian penting dalam membantu praktisi akuntansi memahami perubahan standar akuntansi serta mempercepat proses adaptasi terhadap sistem pelaporan keuangan PTNBH. Dengan demikian, profesionalitas dimaknai tidak hanya sebagai hasil dari inisiatif individu untuk terus belajar, tetapi juga sebagai proses yang dibangun melalui komitmen organisasi dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pengembangan kompetensi pegawai. Temuan tersebut sejalan dengan Rosalia dan Kawedar (2017) yang menyatakan bahwa komitmen pimpinan dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam meningkatkan kompetensi pegawai dan mendukung keberhasilan implementasi perubahan organisasi.

Bagi praktisi akuntansi, profesionalitas bukan dimaknai sebagai sekadar kemampuan teknis menyusun laporan keuangan, melainkan sebagai pengalaman menjadi individu yang terus berkembang melalui proses belajar, menghadapi ketidakpastian, menginterpretasikan standar, serta bertanggung jawab atas setiap keputusan akuntansi yang diambil.

Transformasi menuju PTNBH membuat mereka tidak lagi melihat profesi akuntansi sebagai pekerjaan administratif yang berorientasi pada kepatuhan, tetapi sebagai profesi yang menuntut kemampuan berpikir kritis, pembelajaran berkelanjutan, inovasi, dan penggunaan *professional judgement*. Dengan demikian, profesionalitas dalam penelitian ini dimaknai sebagai transformasi identitas profesional yang mengubah praktisi akuntansi dari pelaksana prosedur menjadi profesional yang mandiri, reflektif, inovatif, serta mampu menggunakan *professional judgement* dalam menghasilkan informasi keuangan yang andal dan akuntabel. Transformasi tersebut diwujudkan melalui pembelajaran berkelanjutan, kemampuan menginterpretasikan standar akuntansi, keberanian menciptakan inovasi, serta dukungan organisasi dalam mengembangkan kompetensi praktisi akuntansi. Pemaknaan tersebut juga menunjukkan bahwa perubahan akuntansi berlangsung melalui perubahan aturan dan rutinitas kerja yang kemudian membentuk praktik baru di dalam organisasi (Burns & Scapens, 2000).

## **2. Memaknai Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi**

Perubahan status menjadi PTNBH membawa Universitas untuk membangun sistem informasi akuntansi secara mandiri. Dimana ketika Universitas berstatus BLU segala sesuatu terkait sistem pengelola keuangan hingga pelaporan sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Namun saat bertransformasi menjadi PTNBH, Universitas dituntut untuk membangun sendiri sistem informasi akuntansi.

*"kalau dari BLU dulu menggunakan SAKTI, kalau dengan PTNBH otomatis kita harus mengembangkan sistem dari nol karena SAKTI sudah tidak bisa dipergunakan untuk laporan keuangan PTNBH".(PW)*

Pernyataan informan PW menunjukkan bahwa perubahan status dari BLU menjadi PTNBH mengakibatkan sistem informasi yang sebelumnya digunakan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan PTNBH. Kondisi tersebut menuntut universitas untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi secara mandiri. Pengalaman tersebut mengindikasikan bahwa transformasi menuju PTNBH tidak hanya berdampak pada perubahan regulasi dan standar akuntansi, tetapi juga menuntut perubahan infrastruktur serta sistem informasi yang mampu mendukung pengelolaan keuangan secara mandiri.

*"Dulu kan kita SAP dibantu dengan sistemnya pemerintah... sekarang kita harus membangun aplikasi sendiri". (JS)*

Pernyataan informan JS menunjukkan bahwa perubahan menuju PTNBH tidak hanya sebagai pergantian sistem informasi yang digunakan dalam pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai pergeseran tanggung jawab organisasi dalam mengelola sistem informasi akuntansi. Jika sebelumnya universitas hanya berperan sebagai pengguna sistem yang disediakan pemerintah, setelah bertransformasi menjadi PTNBH universitas dituntut untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem informasinya sendiri sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi menuju PTNBH mendorong universitas untuk membangun kapasitas organisasi melalui pengembangan sistem informasi akuntansi yang dikelola secara mandiri. Literatur mengenai sistem informasi akuntansi menegaskan bahwa integrasi antara fungsi akuntansi dan sistem informasi bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana informasi, proses, dan kebutuhan manajerial dipertemukan dalam satu arsitektur organisasi (Rom & Rohde, 2007). Dalam konteks penelitian ini, pengembangan sistem informasi akuntansi menjadi salah satu bentuk upaya universitas membangun kapasitas organisasi untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih mandiri dan akuntabel.

*"...kita harus mengembangkan sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan, mulai dari pencatatan aset, mulai dari pencairan dana sampai dengan laporan keuangan..." (PW)*

Pernyataan informan PW menunjukkan bahwa pembangunan sistem informasi akuntansi tidak hanya sekadar sebagai penyediaan aplikasi untuk menghasilkan laporan keuangan, tetapi sebagai upaya mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan dalam satu sistem yang saling terhubung. Bagi informan, sistem informasi harus mampu mendukung seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pengelolaan aset, pelaksanaan anggaran, hingga penyusunan laporan keuangan, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat, konsisten, dan mendukung pengambilan keputusan.

Pengalaman tersebut juga menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi akuntansi merupakan proses yang kompleks karena memerlukan integrasi antara kebutuhan akuntansi, teknologi informasi, serta kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembangunan sistem menjadi tantangan tersendiri bagi praktisi akuntansi, mengingat sistem yang digunakan pada PTNBH merupakan hasil pengembangan yang dirancang dan dibangun secara mandiri oleh universitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi menuju PTNBH tidak hanya menuntut perubahan pada aspek pelaporan keuangan, tetapi juga kemampuan organisasi dalam membangun sistem informasi yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan.

*"...kita harus memikirkan atau merancang sistem mulai dari pengeluaran/pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan. Merancang sistem tidak mudah ya mas, di sana kita harus berpikir bagaimana suatu sistem ke depannya dapat menjadi sistem yang andal, terintegrasi, akuntabel, efektif, dan efisien." (AF)*

Pernyataan informan AF menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi akuntansi sebagai proses yang memerlukan perencanaan strategis dan pemikiran yang komprehensif. Bagi informan, pembangunan sistem tidak hanya bertujuan untuk mendukung penyusunan laporan keuangan, tetapi juga memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari pengeluaran, pertanggungjawaban, hingga pelaporan, dapat terintegrasi dalam satu sistem yang mendukung tata kelola keuangan secara menyeluruh.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sistem informasi akuntansi tidak dipahami sebagai aktivitas teknis semata, melainkan sebagai proses perancangan yang mempertimbangkan keberlanjutan sistem, keandalan informasi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Pandangan tersebut sejalan dengan konsep Sistem Informasi Akuntansi yang dikemukakan oleh Romney dan Steinbart (2018), yang menjelaskan bahwa Sistem Informasi Akuntansi tidak hanya terdiri atas teknologi dan aplikasi, tetapi juga mencakup manusia, prosedur, serta pengendalian internal yang saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang andal dan mendukung pengambilan keputusan.

Dengan demikian, praktisi akuntansi tidak hanya berperan sebagai pengguna sistem, tetapi juga sebagai pihak yang berkontribusi dalam merancang sistem informasi yang mampu mendukung kebutuhan pengelolaan keuangan universitas dalam jangka panjang.

Membangun sistem informasi bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kolaborasi lintas fungsi agar nantinya sesuai dengan hasil yang diharapkan. Terdapat beberapa kendala dalam pengembangan sistem informasi akuntansi seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

*"Kadangkala apa yang kita sampaikan ini penangkapannya berbeda, apa yang ditangkap tim IT, karena kan dasarnya pun berbeda. Kadangkala apa yang kita sampaikan ini penangkapannya berbeda, apa yang ditangkap tim IT, karena kan dasarnya pun berbeda". (RR)*

Dari hasil kutipan wawancara dengan kedua informan tersebut diatas mensiratkan bahwa staf akuntansi dan programmer memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda sehingga terdapat perbedaan pemahaman pada saat pengguna menyampaikan kebutuhannya kepada programmer. Perbedaan latar belakang pendidikan antara pegawai akuntansi dengan programmer menjadi tantangan tersendiri.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sistem informasi akuntansi tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis pengembangan aplikasi, tetapi juga pada kemampuan membangun komunikasi dan kolaborasi lintas disiplin. Praktisi akuntansi dituntut mampu menjelaskan kebutuhan akuntansi secara lebih sistematis, sementara programmer perlu memahami logika dan proses bisnis akuntansi agar sistem yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Dengan demikian, kolaborasi dan komunikasi menjadi bagian penting dalam proses membangun sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan sesuai dengan karakteristik PTNBH. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tu Thanh Hoai dan Nguyen Phong Nguyen (2021) yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi akuntansi dipengaruhi oleh kolaborasi lintas fungsi dan komunikasi antarunit organisasi. Kolaborasi tersebut memungkinkan terjadinya integrasi pengetahuan, pertukaran informasi, dan penyamaan pemahaman sehingga sistem informasi akuntansi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

*"Dan yang tidak kalah penting dan yang menjadi aktor utama adalah para tim IT. Nah tim IT ini kan tentunya bukan orang yang mengerti bahasa keuangan dan akuntansi. Mereka harus belajar. Ini kan bahasa geyonannya, mereka harus bisa memahami akuntansi itu yang harusnya 44 SKS menjadi 2 SKS saja. Seperti itu. Jadi pendampingan untuk teman-teman programmer itu juga menjadi tantangan tersendiri. Itu awal-awal yang harus dilalui". (AF)*

Pernyataan informan PW menunjukkan bahwa pembangunan sistem informasi akuntansi tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis programmer, tetapi juga pada proses transfer pengetahuan antara praktisi akuntansi dan tim teknologi informasi. Perbedaan latar belakang keilmuan menyebabkan programmer perlu memahami konsep-konsep dasar akuntansi agar mampu menerjemahkan kebutuhan pengguna ke dalam desain sistem yang sesuai. Bagi informan, proses pendampingan terhadap programmer menjadi bagian penting dalam pengembangan sistem informasi akuntansi karena keberhasilan sistem sangat ditentukan oleh kesamaan pemahaman antara kedua pihak.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sistem informasi akuntansi merupakan proses kolaboratif yang menuntut komunikasi intensif dan pembelajaran lintas disiplin. Praktisi akuntansi tidak lagi hanya berperan sebagai pengguna sistem, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang menjembatani kebutuhan akuntansi dengan implementasi teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan Hoai dan Nguyen (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa kolaborasi antarbagian berkontribusi terhadap efektivitas penggunaan sistem akuntansi melalui integrasi informasi, komunikasi, dan pertukaran pengetahuan yang lebih baik.

Dengan demikian, pengembangan sistem informasi akuntansi dimaknai sebagai proses membangun kesepahaman melalui kolaborasi lintas fungsi untuk menghasilkan sistem yang mampu mendukung kebutuhan pengelolaan keuangan PTNBH secara efektif.

Berdasarkan pengalaman para informan, pengembangan sistem informasi akuntansi tidak dimaknai sekadar sebagai proses membangun aplikasi untuk mendukung pelaporan keuangan. Pengalaman tersebut dimaknai sebagai proses kemandirian organisasi dalam mengelola tata kelola keuangan secara otonom. Kemandirian tersebut diwujudkan melalui kemampuan universitas merancang sistem yang terintegrasi, membangun kolaborasi lintas fungsi, melakukan transfer pengetahuan antara praktisi akuntansi dan programmer, serta menghasilkan sistem informasi yang mampu mendukung pengelolaan keuangan secara efektif, andal, dan akuntabel. Dengan demikian, pembangunan sistem informasi akuntansi menjadi representasi transformasi organisasi menuju tata kelola keuangan PTNBH yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dalam perspektif sistem terintegrasi, manfaat teknologi tidak muncul secara otomatis dari keberadaan aplikasi, tetapi dari proses penghubungan antara sistem, praktik pengendalian, dan kebutuhan pengguna di dalam organisasi (Dechow & Mouritsen, 2005).

### 3. Memaknai Interpretasi Standar Akuntansi

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memerlukan pemahaman konseptual dan kemampuan interpretasi yang memadai. Bagi praktisi akuntansi, penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tidak hanya dipahami sebagai penerapan seperangkat aturan akuntansi, tetapi sebagai proses memahami substansi transaksi melalui interpretasi dan pertimbangan profesional. Kompleksitas tersebut semakin terasa ketika standar maupun regulasi belum memberikan pedoman yang secara eksplisit mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi.

*"Terkait perlakuan tentang hak-hak pegawai non ASN ya mas, PTNBH harus mengacu pada UU Cipta Kerja... Karena kita sadari bahwasanya banyak pimpinan itu yang menganggap PTNBH itu merupakan salah satu dari lembaga institusi pemerintah, tapi di sisi lain ada peraturan bahwa ini bukan sebagai lembaga pemerintah, hanya sebagai penunjukan untuk melaksanakan operasionalnya. Jadi masih banyak yang beranggapan tidak menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Dampaknya kami tidak bisa menghitung imbalan pascakerjanya di laporan keuangan kami."* (PW)

Pernyataan informan PW menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam praktik akuntansi tidak hanya muncul dari interpretasi terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tetapi juga dari perbedaan pemahaman mengenai landasan regulasi yang menjadi dasar penerapan standar tersebut. Perbedaan pandangan mengenai kedudukan hukum PTNBH menyebabkan munculnya perbedaan persepsi dalam menentukan perlakuan akuntansi atas hak-hak pegawai non-ASN, khususnya terkait pengakuan kewajiban imbalan pascakerja.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada lingkungan PTNBH tidak hanya memerlukan pemahaman terhadap standar akuntansi, tetapi juga kemampuan menginterpretasikan berbagai regulasi yang saling berkaitan. Bagi praktisi akuntansi, kondisi tersebut menjadi tantangan karena keputusan akuntansi tidak hanya didasarkan pada ketentuan dalam SAK, tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman para pemangku kepentingan terhadap status kelembagaan PTNBH. Oleh karena itu, praktisi akuntansi dituntut mampu membangun argumentasi profesional dan mengomunikasikan dasar pertimbangan yang digunakan agar tercapai kesepahaman dalam penerapan perlakuan akuntansi.

*"Persepsi kami benar, tapi di pemeriksa tidak benar, misalkan saja ya mas terkait gedung yang dibangun oleh pemerintah katakanlah gedung itu telah selesai dan telah digunakan namun berita acara hibahnya selesainya lama, nah gedung itu selesai dibangun dan digunakan pada tahun 2024 nah kebetulan di tahun 2025 berita acara hibahnya terbit. Saat*

unaudited kami mencatat di laporan keuangan terkait penyusutannya kami hitung semenjak gedung tersebut telah digunakan, tapi hal ini ditolak sama auditor” (AF).

Pengalaman informan menunjukkan bahwa penerapan SAK tidak selalu menghasilkan interpretasi yang sama di antara praktisi akuntansi dan auditor. Berdasarkan pertimbangan profesional yang dimiliki, universitas mulai mengakui penyusutan sejak aset memberikan manfaat ekonomi melalui penggunaannya. Namun, auditor memiliki interpretasi yang berbeda sehingga perlakuan akuntansi tersebut menjadi objek koreksi dalam proses audit.

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa penyusunan laporan keuangan tidak hanya berkaitan dengan penerapan prosedur teknis, tetapi juga melibatkan proses interpretasi terhadap substansi transaksi yang dapat dipahami secara berbeda oleh masing-masing pihak. Bagi praktisi akuntansi, kondisi tersebut menjadi pengalaman yang menegaskan bahwa penerapan SAK tidak selalu menghasilkan satu jawaban yang bersifat mutlak, melainkan memerlukan professional judgment yang didukung oleh argumentasi akuntansi berdasarkan substansi ekonomi transaksi. Dengan demikian, praktik akuntansi pada lingkungan PTNBH dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan profesional yang tidak hanya menuntut pemahaman terhadap standar, tetapi juga kemampuan mempertanggungjawabkan interpretasi yang digunakan ketika berhadapan dengan perbedaan pandangan dari auditor maupun pemangku kepentingan lainnya. Temuan ini sejalan dengan Ivan (2016) yang menjelaskan bahwa situasi akuntansi yang kompleks, dinamis, dan belum memiliki pedoman yang rinci menuntut penggunaan professional judgment dalam menentukan perlakuan akuntansi yang tepat. Pengalaman informan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa professional judgment tidak hanya digunakan untuk menentukan perlakuan akuntansi, tetapi juga untuk membangun argumentasi profesional ketika terjadi perbedaan interpretasi dengan auditor maupun pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan pengalaman para informan, interpretasi terhadap Standar Akuntansi Keuangan dimaknai sebagai proses memahami substansi transaksi melalui pertimbangan profesional, bukan sekadar menerapkan ketentuan standar secara tekstual. Perbedaan pandangan dengan auditor maupun pemangku kepentingan menunjukkan bahwa penerapan SAK tidak selalu menghasilkan satu jawaban yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, praktisi akuntansi memaknai interpretasi standar akuntansi sebagai proses membangun argumentasi profesional yang didasarkan pada substansi ekonomi transaksi, ketentuan standar akuntansi, serta regulasi yang melingkupinya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pengalaman para informan, profesionalitas dimaknai sebagai transformasi identitas profesional yang mengubah praktisi akuntansi dari pelaksana prosedur menjadi profesional yang mampu memahami substansi standar akuntansi, menggunakan professional judgment, serta terus mengembangkan kompetensinya melalui pembelajaran berkelanjutan. Profesionalitas tidak lagi dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan semata, tetapi sebagai komitmen untuk terus belajar, berinovasi, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan akuntansi yang diambil.

Pengembangan sistem informasi akuntansi dimaknai sebagai proses kemandirian organisasi dalam mengelola tata kelola keuangan setelah bertransformasi menjadi PTNBH. Bagi praktisi akuntansi, pembangunan sistem tidak hanya dipahami sebagai pengembangan aplikasi, tetapi sebagai proses merancang sistem yang terintegrasi, membangun kolaborasi lintas fungsi, serta menyatukan pengetahuan akuntansi dan teknologi informasi untuk menghasilkan sistem yang mampu mendukung pengelolaan keuangan secara efektif, andal, dan akuntabel.

Interpretasi terhadap Standar Akuntansi Keuangan dimaknai sebagai proses memahami substansi transaksi melalui pertimbangan profesional. Pengalaman menghadapi perbedaan interpretasi dengan auditor maupun pemangku kepentingan menunjukkan bahwa penerapan SAK tidak selalu menghasilkan satu jawaban yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, praktisi akuntansi memaknai

interpretasi standar sebagai kemampuan membangun argumentasi profesional yang didasarkan pada substansi ekonomi transaksi, ketentuan standar akuntansi, dan regulasi yang berlaku sehingga keputusan akuntansi yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, pengalaman praktisi akuntansi menunjukkan bahwa transformasi dari BLU menjadi PTNBH tidak hanya mengubah sistem pelaporan keuangan, tetapi juga mengubah cara praktisi akuntansi memahami profesinya, mengelola sistem informasi, dan menginterpretasikan standar akuntansi. Profesionalitas, pembangunan sistem informasi akuntansi, dan interpretasi standar merupakan tiga pengalaman yang saling berkaitan dalam membentuk praktik akuntansi pada lingkungan PTNBH. Ketiga pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perubahan menuju PTNBH dimaknai sebagai proses transformasi profesional dan organisasi yang menuntut pembelajaran berkelanjutan, kemandirian institusi, kolaborasi lintas fungsi, serta kemampuan menggunakan professional judgment dalam menghasilkan informasi keuangan yang andal, akuntabel, dan sesuai dengan substansi ekonomi transaksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alase, A. (2017). The *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA): A guide to a good qualitative research approach. *International Journal of Education & Literacy Studies*, 5(2), 9–19. <https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v5n.2p.9>
- Burns, J., & Scapens, R. W. (2000). Conceptualizing management accounting change: An institutional framework. *Management Accounting Research*, 11(1), 3–25. <https://doi.org/10.1006/mare.1999.0119>
- Ciuhureanu, A. (2022). The continuous professional development of accounting professionals and the impact on the valuation of accounting information. *Scientific Bulletin*, 27(2), 93–101. <https://doi.org/10.2478/bsaft-2022-0011>
- Connolly, C., & Hyndman, N. (2006). The actual implementation of accruals accounting: Caveats from a case within the UK public sector. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 19(2), 272–290. <https://doi.org/10.1108/09513570610656123>
- Dechow, N., & Mouritsen, J. (2005). Enterprise resource planning systems, management control and the quest for integration. *Accounting, Organizations and Society*, 30(7–8), 691–733. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2004.11.004>
- Ernawati, E., & Setiawan, A. (2023). Analisis implementasi SAK umum dan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangan pada perguruan tinggi negeri badan hukum (studi pada Universitas Gadjah Mada). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(1), 62–73. <https://doi.org/10.22146/abis.v11i1.82084>
- Fomina, O., Zadniprotsky, O., Korol, S., & Romashko, O. (2022). Professional judgement in accounting: Contents and conditions of application. *Business: Theory and Practice*, 23(1), 26–38. <https://doi.org/10.3846/btp.2022.13330>
- Gigli, S., Mariani, L., & Trivellato, B. (2018). Assimilating accounting innovations: Lessons from Italian public universities. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 14(4), 381–401. <https://doi.org/10.1108/JAOC-10-2017-0101>
- Herlina, Firmansyah, R., Harjanto, A. P., & Hartono, R. (2023). Analysis of the readiness for changes in the financial system of public service agency state university (BLU) become PTN legal entity (PTNBH) (study at Universitas Negeri Semarang). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(2), 1472–1485. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i2.49523>
- Hertrianto, I. P., Poernamawatie, F., Hertanto, R. H., & Hastuti, S. (2025). Analysis of fixed asset accounting following changes in the status of state universities as legal entities (PTNBH). *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 4(6), 976–986. <https://doi.org/10.54408/jabter.v4i6.494>

- Hoai, T. T., & Nguyen, N. P. (2021). How does cross-functional cooperation influence organizational performance? The mediating role of management accounting system. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1907011. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1907011>
- Ivan, I. (2016). The importance of *professional judgement* applied in the context of the International Financial Reporting Standards. *Audit Financiar*, 14(142), 1127–1135. <https://doi.org/10.20869/AUDITF/2016/142/1127>
- La Kahija, Y. F. (2017). Penelitian fenomenologis: Jalan memahami pengalaman hidup. PT Kanisius.
- Lapsley, I. (2009). *New Public Management: The cruellest invention of the human spirit?* *Abacus*, 45(1), 1–21. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2009.00275.x>
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum*.
- Rom, A., & Rohde, C. (2007). Management accounting and integrated information systems: A literature review. *International Journal of Accounting Information Systems*, 8(1), 40–68. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2006.12.003>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting information systems* (14th ed.). Pearson.
- Rosalia, R., & Kawedar, W. (2017). Implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual pada perguruan tinggi negeri badan hukum: Analisis deskriptif kualitatif. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 234–245. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19241>
- Smith, J. A. (2011). Evaluating the contribution of interpretative phenomenological analysis. *Health Psychology Review*, 5(1), 9–27. <https://doi.org/10.1080/17437199.2010.510659>
- Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). *Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research*. SAGE Publications.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.